

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Transisi kebijakan terjadi karena adanya perubahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebiasaan dan pola hidup yang baru adalah hasil dari terjadinya transisi kebijakan. Transisi kebijakan memerlukan perencanaan serta persiapan yang matang sehingga dapat menimbulkan dampak baik bagi masyarakat dan tidak menguntungkan satu pihak saja. Kolaborasi antar pihak sebagai perumus kebijakan pun sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan semua pihak. Teori Transisi Kebijakan menjelaskan bahwa transisi kebijakan akan menghasilkan inovasi untuk mencapai keberlanjutan dan memberikan wawasan terkait implementasi strategis kebijakan. Implementasi ini akan meningkatkan kapasitas transisi kebijakan publik yang berkelanjutan. Sementara itu, inovasi yang lahir dari transisi kebijakan akan menimbulkan efektivitas bagi masyarakat karena kemunculan sesuatu yang baru.

Dalam penelitian ini, transisi kebijakan terjadi karena adanya perubahan moda transportasi. Perencanaan perubahan moda transportasi digagas oleh Pemkot Bogor guna berupaya untuk mengurangi jumlah angkot dan menggantikan angkot ke moda transportasi Biskita. Program ini dilakukan secara perlahan dengan memperhatikan aspek-aspek yang akan terdampak dari pemberlakuan perubahan moda transportasi. Pemkot Bogor bekerja sama dengan DPRD, Dishub Kota Bogor, dan Polresta Bogor Kota, dalam mengelola transisi kebijakan tentang perubahan moda transportasi ini. Organda dan KKSU sebagai pihak pelaksana dalam

operasional angkot di lapangan pun saling bekerja sama untuk meminimalisasi dampak bagi mereka mengingat mereka adalah pihak yang bertanggung jawab dan menaungi pengelolaan angkot serta kualitas supir angkot.

4.2 Saran

Penelitian ini disusun untuk melihat pengelolaan transisi kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor mengenai perubahan moda transportasi dari angkot menjadi Biskita. Kolaborasi antara Pemkot Bogor melalui DPRD Kota Bogor, Dishub Kota Bogor, dan Polresta Bogor Kota, dengan para pihak yang terlibat dalam transisi kebijakan, seperti Organda dan KKSU, membuktikan bahwa pengelolaan transisi kebijakan membutuhkan perencanaan dan persiapan yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan oleh peneliti untuk menjalankan pengelolaan transisi kebijakan dari angkot menjadi Biskita adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu. Dalam hal ini, program perubahan moda transportasi perlu dipersiapkan sesuai dengan kemampuan Pemkot Bogor dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh adalah pembangunan jalur khusus Biskita.
2. Koordinasi antara Pemkot Bogor dengan Kemenhub perlu dilaksanakan lebih lanjut, terutama dalam kebutuhan anggaran subsidi yang diperlukan untuk operasionalisasi Biskita. Apabila Kemenhub merasa APBD Kota Bogor sudah cukup untuk membiayai operasional Biskita, maka harus ada kesepakatan kedua belah pihak.

3. Tahap evaluasi dengan memperhatikan kritik serta saran dari masyarakat sebagai pengguna jasa Biskita. Pemerintah Kota Bogor dapat memberikan wadah untuk menampung berbagai masukan dari masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan Biskita sebagai bentuk pelayanan publik. Evaluasi terhadap kondisi unit armada serta operasionalisasi Biskita pun sebaiknya dilakukan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat saat menggunakan Biskita.